

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak setiap warga negara di Indonesia. Di manapun tempat mereka berada di kota, desa, maupun tempat terpencil sekalipun mereka berhak menerima pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia ketiga.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan soisal, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Kemudian diperjelas lagi dalam Undang-Undang Dasar BAB XIII pasal 31 yang berisi tentang pendidikan dan kebudayaan. (1) setiap warga berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) negara

¹ Harun Alrasid dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2008), hal. 15

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dari belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.²

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, pemerintah lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama untuk memberikan program pendidikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Melalui beberapa peraturan yang telah ditetapkan program pemerintah akan terlaksana. Demi masa depan yang lebih baik, bangsa Indonesia harus bisa menjawab tantangan masa depan yang ada. Bangsa yang maju akan memperhatikan pendidikan para generasinya. Karena di tangan para generasi itulah nasib bangsa akan ditentukan.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka kita tidak bisa lepas dari keberadaan guru. Karena guru menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan ada pendidik (guru) yang berfungsi sebagai pelatih, pengembang, pemberi, atau pewaris. Kemudian terdapat bahan yang dilatihkan, dikembangkan, diberikan dan diwariskan yakni pengetahuan, keterampilan, berpikir, karakter yang berupa bahan ajar, serta ada murid yang menerima latihan; pengembangan, pemberian dan pewarisan pengetahuan, ketrampilan, pikiran dan karakter.

² Harun Alrasid dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2008), hal. 21

Dalam menjalankan tugasnya seorang guru setidaknya harus memiliki kemampuan dan sikap sebagai berikut:

1. Menguasai kurikulum
2. Menguasai substansi materi yang diajarkannya
3. Menguasai metode dan evaluasi belajar
4. Tanggungjawab terhadap tugas
5. Disiplin.³

Kemampuan menguasai kurikulum maksudnya adalah guru harus tahu batas-batas materi yang harus disajikan dalam kegiatan belajar mengajar, baik keluasan materi, konsep, maupun tingkat kesulitannya sesuai dengan yang digariskan dalam kurikulum. Sedang kemampuan menguasai substansi materi maksudnya adalah guru tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan bahan pelajaran yang telah ditetapkan, tetapi guru juga harus menguasai dan menghayati secara mendalam semua materi yang akan diajarkan. Lalu, dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus menguasai metode-metode pembelajaran. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa semua mata pelajaran yang disajikan dalam suatu waktu di sekolah tertentu tidak bisa sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran yang sama. Artinya pelajaran-pelajaran yang diajarkan dengan metode yang sama pula, hal ini tidak mungkin; melainkan guru harus memilih metode apa yang cocok untuk suatu mata pelajaran. Demikian juga dengan evaluasi belajar, semua mata pelajaran tidak bisa dievaluasi dengan satu model evaluasi belajar saja, melainkan harus sesuai dengan pelajaran yang ada dan anak didiknya.

³ Binti Maunah, *Landasan Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 151

Dalam lingkup pendidikan, sebenarnya ada dua macam evaluasi. *Pertama*, evaluasi hasil pembelajaran, dan yang *kedua* adalah evaluasi program pengajaran. Evaluasi hasil pembelajaran menggunakan informasi berlandaskan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan yang diperoleh melalui asesmen untuk membuat keputusan atau pertimbangan terkait nilai-nilai relative, dan akseptabilitas suatu kondisi yang digambarkan melalui asesmen. Dari terminologi pengukuran, asesmen (penilaian) dan evaluasi, makna evaluasi mungkin yang paling kompleks dan paling kurang dipahami, terutama terkait dengan gagasan bahwa dasar evaluasi adalah nilai (*value*). Oleh sebab itu, sering kali evaluasi dijumpukan dengan asesmen yang berarti penilaian.⁴

Jika kita mengevaluasi, apa yang kita lakukan adalah terlibat dalam sejumlah proses yang dirancang untuk menyediakan informasi yang dapat membantu kita membuat suatu pertimbangan dari suatu situasi tertentu. Jika kita melaksanakan evaluasi, kita akan memperoleh informasi apakah situasi atau kondisi yang dievaluasi tersebut berharga, cocok, baik valid, legal, dan lain sebagainya. Guru pada khususnya, melakukan evaluasi setiap hari secara ajeg. Evaluasi seperti itu biasanya dilaksanakan dalam konteks perbandingan antara yang dimaksud untuk dipelajari (pembelajaran, kemajuan, perilaku) dibandingkan dengan apa yang telah diperoleh. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengklasifikasikan objek, situasi, siswa, kondisi, dan lain-lain sesuai dengan kriteria kualitas tertentu. Evaluasi merupakan prosedur

⁴ Ismet Basuki dan Hariyanto, *Asesmen Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) Hal. 221

yang digunakan untuk menetapkan apakah suatu subjek (misalnya peserta didik) memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelumnya atau tidak.⁵

Sekolah yang bermutu bisa dilihat dari lulusan sekolah itu. Peningkatan mutu lulusan dapat dicapai secara bertahap. Pembinaan mutu lulusan sekolah harus diawali dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, pembenahan kurikulum, dan peningkatan mutu kinerja pendidik. Lebih-lebih karena sasaran pendidikan adalah manusia yang harus dibina potensinya baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan evaluasi belajar merupakan upaya pengukuran terhadap seberapa jauh kegiatan pendidikan secara keseluruhan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Paling tidak hasil dari evaluasi itu harus dapat memberi gambaran secara global mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Apabila hal ini dapat terwujud, maka evaluasi belajar itu dapat menghasilkan data yang akurat untuk mendeskripsikan perolehan belajar siswa dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara komprehensif, bukan hanya mengukur perolehan belajar siswa dari aspek kognitif saja.⁶

Pengertian evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas (nilai dan arti) pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran, berdasarkan pertimbangan dan Kriteria tertentu, sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah suatu proses atau

⁵ *Ibid.*, Hal. 221-222

⁶ Ali Rohmad, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal.87

kegiatan yang sistematis dan menyeluruh untuk pengumpulan serta pengolahan informasi tentang pencapaian proses dan hasil belajar siswa.⁷

Penilaian dalam Kurikulum 2013 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Indonesia. SNP ini, digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Pasal 2A Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama Pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.⁸

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penilaian Autentik dan non-autentik. Penilaian Autentik merupakan pendekatan utama dalam penilaian tersebut.⁹ Kemudian, dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek: (a) sikap; (b) pengetahuan; dan (c) keterampilan.¹⁰

Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran PAI yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di MI/Sekolah Dasar. Lewat pendidikan Akidah

⁷ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) Hal.9-10

⁸ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*

⁹ *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*

¹⁰ *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan*

Akhlak dijadikan landasan pengembangan spiritual. Bila diajarkan dengan baik, maka juga akan tercipta generasi yang berpendidikan agama yang baik. Dengan demikian posisi pendidikan agama sangat urgen walaupun dengan banyak tantangan.

Secara substansial mata pelajaran Akidah Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. *Al-akhlak al-karimah* ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia.

Kurikulum 2013 sudah lama diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir. Kurang lebih tiga tahun lamanya. Sejak saat itu sistem pembelajaran pun menjadi berubah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada penilaian dalam pembelajaran mengikuti program yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu. Dalam penilaian pembelajaran ini, penilaian autentik menjadi salah satu ciri dalam standar penilaian Kurikulum 2013. Namun, pada kenyataannya banyak guru yang masih kesulitan untuk mengimplemantasikan penilaian autentik. Kesulitan terletak pada rumitnya pembuatan rubrik penilaian. Selain itu, waktu yang dibutuhkan dalam pengimplementasian penilaian itu cukup lama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang penilaian autentik pada mata pelajaran Akidah Akhlak.

Dengan lokasi penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Wonodadi Blitar yang sekaligus sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013. Sehingga sesuai dengan uraian dan penjelasan di atas, maka peneliti mengkaji tentang “Penilaian Autentik oleh Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Wonodadi Blitar”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penilaian autentik aspek sikap yang digunakan guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Wonodadi Blitar?
2. Bagaimanakah penilaian autentik aspek pengetahuan yang digunakan guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Wonodadi Blitar?
3. Bagaimanakah penilaian autentik aspek keterampilan yang digunakan guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Wonodadi Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penilaian autentik aspek sikap yang digunakan guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Wonodadi Blitar.
2. Menjelaskan penilaian autentik aspek pengetahuan yang digunakan guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Wonodadi Blitar.
3. Menjelaskan penilaian autentik aspek keterampilan yang digunakan guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Wonodadi Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yakni; kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis karya ilmiah ini diharapkan mampu menambah angka asset keilmuan Negara kita tercinta Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan cakrawala berfikir bagi semua orang, khususnya bagi orang-orang yang suka dan menggeluti dunia pendidikan.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya adalah:

a. Peneliti

Dengan adanya penelitian dan pembuatan karya ini mampu membuat penulis mengaktualisasikan diri dalam dunia pendidikan dan penelitian serta sebagai bekal untuk menambah wawasan peneliti, terutama wawasan yang berkaitan dengan penilaian autentik dalam Kurikulum 2013.

b. Guru

Mendapatkan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi siswa dan juga sekaligus sebagai bahan bacaan ilmiah yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan wawasan untuk menentukan kebijakan dalam membantu mencetak siswa-siswi yang berkualitas dan memiliki prestasi belajar. Selain itu, memberikan bahan masukan pada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengimplementasikan penilaian autentik Kurikulum 2013.

c. Siswa

Memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan menarik dalam proses belajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Karena dalam penilaian pembelajarannya tidak melulu dalam aspek kognitif saja.

d. Sekolah

Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, bahan pertimbangan dan binaan lebih lanjut dalam proses belajar mengajar.

e. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan pertimbangan dalam meningkatkan rancangan penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan/ rujukan dan perbandingan.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari terjadi persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada batasan-batasannya. Adapun penegasan konseptual dan penegasan operasional yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penilaian Autentik

Penilaian autentik adalah jenis penilaian yang mengarahkan peserta didik untuk mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dan situasi yang dijumpai dalam dunia nyata.¹¹

¹¹ Ridwan Abdullah Sani, *Penilaian Autentik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) Hal. 23

b. Tinjauan Mata Pelajaran Akidah Akhlak tingkat MTs

Akidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran PAI yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari tentang rukun iman mulai dari iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, sampai iman kepada Qada dan Qadar yang dibuktikan dengan dalil-dalil *naqli* dan *aqli*, serta pemahaman dan penghayatan terhadap *al-asma' al-husna* dengan menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang dalam realitas kehidupan individu dan sosial serta pengamalan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.¹²

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud penilaian autentik oleh guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Wonodadi Blitar adalah penilaian yang benar-benar dilakukan oleh guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam aspek sikap (religius dan sosial), pengetahuan dan keterampilan dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir Wonodadi Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan mencari dan memberikan gambaran secara umum tentang isi

¹² Moh. Sholehudin dan Lukman Chamim, *Akidah Akhlak untuk Pedoman Guru Kelas VIII*, (Jakarta : Kementerian Agama, 2015) Hal. Ix-xi

dari skripsi ini. Adapun urutan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, memuat latar belakang masalah penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian baik kegunaan sebagai kepentingan teoritis maupun praktis, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI, dalam kajian pustaka ini dibahas mengenai hasil kajian pustaka yang mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai kajian dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan variabel, selain itu juga berisi kajian penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN, yang memuat rancangan penelitian yang berisi metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN yang memuat paparan data dan temuan penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN yang memuat tentang pembahasan temuan penelitian.

BAB IV: KESIMPULAN yang memuat kesimpulan dan saran.